



DIALOGUE

JURNAL ILMU ADMINISTRASI
DAN KEBIJAKAN PUBLIK

ANALISIS RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTAS PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

(Studi Kasus Di Distrik Semangga Kabupaten Merauke)

Didi Prayitno, Wahyu Pujoyono, Hardi Warsono

ABSTRACT

Program Obligated To Learn nine Year represent governmental program in order to improving human resource. This program which ought to finish year 2004 finally backing to become year 2008 for the complete of. this Program also happened Canton Semangga, Sub-Province of Merauke. This Research aim to know related old fellow view about child value with participation program obliged to learn nine year, related/relevant perception of old fellow about education with participation program obliged to learn nine year, and is related/relevant condition of economic social old fellow with participation program obliged to learn nine year. Research by using case study combining various means intake of data to study 4 this topic of case above descriptively qualitative. Result of research of still found problems related to society participation in execution of program obliged to learn nine year Canton Semangga.

Keyword : *Education, child value, condition of economic social*

A. PENDAHULUAN

Kecenderungan kehidupan dalam era globalisasi telah membawa berbagai perubahan yang berlangsung dengan cepat

terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan segala dampaknya. Oleh karena itu, lingkungan dalam situasi global mulai terasa, antara lain lingkungan yang merangsang pemikiran majemuk, lingkungan yang memerlukan sumber daya manusia

Alamat Korespondensi:
MAP UNDIP
Telp:024-8452791
Email:mapdialogue@yahoo.com

yang menguasai iptek, lingkungan yang menghormati seseorang yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan produktif, dan lingkungan yang lebih mengutamakan masyarakat "meritokrasi", yaitu masyarakat yang lebih menghargai prestasi daripada status dan asal-usul (Surya, 2000:4)

Melihat kenyataan ini mau tidak mau bangsa Indonesia harus terjun dalam kancah tersebut, lengkap dengan segala konsekwensinya. Untuk menyasiasi ini bangsa Indonesia telah mengambil sikap dalam menghadapi perancangan ini. Hal ini terlihat dalam arah kebijakan bidang pendidikan sebagaimana termaktub dalam GBHN. Salah satu arah kebijakannya adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukung dan perlindungan sesuai dengan potensinya (GBHN, 1999 : 33).

Kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam GBHN 1999 dilandasi adanya

kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan, bahkan dalam negara berkembang dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang dilakukan antara lain memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan. Mengingat, maju mundurnya atau berkualitas tidaknya sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan sebagai agen dan pencetak sumber daya manusia.

Alasan lain pemerintah dengan mengedepankan pembangunan pendidikan karena melihat kenyataan bahwa berdasarkan data UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) menunjukkan dari 174 negara, Indonesia berada pada posisi kurang menggembirakan yakni peringkat 110, sementara negara Asean lainnya berada di atasnya, Japan berada di peringkat 11, Singapura berada peringkat 25, Korea berada pada peringkat 28 Brunei Darusalam peringkat 33, Malaysia peringkat

61, Thailand peringkat 73, Filipina urutan 84, Cina pada peringkat 85, Vietnam di peringkat 108, Indonesia peringkat 110, Myanmar peringkat 129, Kamboja pada peringkat 130. (UNDP, 2005)

Pengembangan dalam bidang pendidikan di Indonesia sekarang ini menggunakan empat strategi dasar, yakni, *pertama*, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, *kedua* relevansi, *ketiga*, *peningkatan kualitas* dan *ke empat*, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan (Natsir, 2002). Dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Strategi ini perlu mendapat prioritas karena ternyata banyak anak-anak di Indonesia, terutama di pedesaan masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, terutama di tingkat SLTP. Di samping itu, masalah pemerataan pendidikan menurut Hadikusum (1995:99) mencakup tiga aspek pokok, yaitu persamaan kesempatan, (*equality of opportunity*) aksesibilitas (*accessibility*), dan keadilan atau kewajaran (*equity*)

Pemerataan kesempatan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi” Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Begitu pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak membedakan warga negara menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Aksesibilitas artinya setiap orang tanpa membedakan asal usulnya memiliki akses (kesempatan masuk) yang sama kedalam pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan disini adalah perbedaan perlakuan pada peserta didik sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Secara moral-etis adalah adil dan wajar apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya.

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan pencaangan program wajib belajar sembilan tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan "melek" huruf dan masyarakat belajar.

Program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah merupakan kelanjutan dari program-program pendidikan sebelumnya. Program pendidikan dengan penekanan pada peningkatan sumber daya manusia sebenarnya telah dimulai tahun 1983 dengan penganjuran wajib belajar enam tahun, yakni untuk usia 7-15 tahun secara nasional. Suksesnya Program tersebut akhirnya memotivasi pemerintah untuk melanjutkan program wajib belajar menjadi sembilan tahun sejak tahun 1994 yang lalu. Program tersebut sekaligus untuk menjawab dinamika perkembangan zaman yang terus berkembang.

Program wajib belajar sembilan tahun sifatnya anjuran, tetapi program ini hendaknya memiliki kekuatan yang mampu mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pada gilirannya

program ini mampu menuntaskan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang SLTP. Sementara itu, orang tua yang memiliki anak usia sekolah dianjurkan, bahkan diwajibkan menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang tersebut. Meskipun para orang tua yang tidak mengindahkan program ini tidak mendapatkan sanksi hukum, diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menyukseskan program ini. Tanggung jawab moral ini tidak semata-mata untuk pendidikan anaknya, tapi juga menyangkut tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan.

Nilai budaya yang berlaku di masyarakat atau yang dianut seorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap pendidikan, terutama dalam memandang nilai anak. Nilai yang dimaksud disini adalah hal-hal yang dianggap baik dan diyakininya. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang dianggap baik akan selalu dihargai, dipelihara, dan diagungkan dalam mengambil keputusan. Nilai yang merupakan kaidah hidup seseorang

akan tercermin melalui pola pikir, aspirasi, persepsi, dan bertindak (Kaswardi, 1998:7).

Faktor berikut yang dapat mempengaruhi partisipasi program wajib belajar sembilan tahun adalah persepsi orangtua tentang pendidikan, Persepsi orangtua terhadap pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orangtua dalam melihat pentingnya pendidikan akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi disini adalah keinginan, harapan, atau cita-cita orangtua terhadap tingkat pencapaian pendidikan anak-anaknya.

Selain faktor yang sifatnya perspektif, ada latar belakang lain yang mendasari pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, antara lain faktor geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, dan sarana prasarana pendidikan.

Faktor geografis yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang luar biasa luasnya dan tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, mereka

sebagian masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan yang tradisional. Oleh karena itu sebagian besar mereka yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Keadaan seperti ini merintangi tersebarluasnya kesempatan pendidikan secara merata. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ada suatu kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan ke jenjang SLTP, bahkan sebagian lagi ada yang belum lulus SD. Masalah ini bukan karena anak tidak mau, tapi karena letak tempat tinggal mereka yang tidak mungkin dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik, disamping faktor geografis juga usaha menamakan pengertian tentang pentingnya pendidikan karena pola hidup yang terbelakang.

Berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia 80% sebagian besar adalah masyarakat petani, namun sebenarnya jumlah tersebut hanya sebelas juta kepala keluarga yang mempunyai tanah sekitar setengah hektar, enam

juta kepala keluarga hanya seperempat hektar, bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah garapan atau sebagian hanya buruh tani (Sastrosupono, 1984:18). Dengan kondisi seperti itu kondisi perekonomian mereka tentu saja masih banyak dijumpai keluarga prasejahtera. Padahal rata-rata mereka mempunyai anak tiga atau lima sehingga sebagian besar mereka dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Tersendatnya dan tak terjangkaunya masyarakat dari masalah pendidikan ternyata juga disebabkan oleh tradisi masyarakat yang terbelakang. Paling tidak fenomena di lokasi penelitian, menunjukkan hal tersebut. Contoh di di Distrik Semangga Kabupaten Merauke, terdapat anggapan masyarakat bahwa menyekolahkan anak akan merugikan keluarga. Alasannya adalah dengan sekolah anak-anak akan malas kerja, tak lagi dapat membantu orang tua di sawah atau ladang atau pekarangan, menjadi pandai dan akhirnya berani pada orangtua, atau bersekolah akhirnya juga akan menganggur karena mencari pekerjaan amat sulit, sementara banyak sarjana yang masih menganggur.

Alasan seperti ini selalu mewarnai pola pandang para masyarakat pedesaan yang pekerjaannya sebagai petani, khususnya di Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Sebagai masyarakat petani tenaga kerja sangat penting, anak-anak juga merupakan tenaga kerja bagi keluarga yang bersangkutan. Tradisi bertani, berladang, dan bercocok tanam lainnya melahirkan suatu kebiasaan menggunakan anak istri sebagai tenaga kerja murah. Dengan demikian, akhirnya anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah.

Perkembangan berikutnya memang mereka mengerti tentang perkembangan zaman. Akan tetapi, mereka masih tetap beranggapan bahwa asal anak-anak mereka sudah bisa membaca dan menulis masalah sekolah sudah cukup dan tidak perlu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan anak perempuan akan lebih parah lagi keadaanya, mereka tidak mendapatkan kesempatan seluas anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan disekolahkan tidak ada manfaatnya sebab biarpun bersekolah tinggi akhirnya akan kembali juga, yaitu tugasnya

sebagai istri yang harus di dapur dan beranak. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau di daerah di pedesaan yang sebenarnya masih dalam usia sekolah terpaksa harus dinikahkan. Ditambah lagi adanya alasan bahwa tanggung jawab keluarga adalah laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, sementara pihak perempuan hanya mengikuti saja.

Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; (2) program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi; (3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 tahun, akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa; (5) peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun (Daliyo, 2004:2)

Ada empat kendala yang sudah di antisipasi oleh

pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) secara kuantitatif target yang harus dikejar sangat besar terutama karena besarnya jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP; (2) tingkat partisipasi sekolah pada usia SLTP rendah dibandingkan dengan usia SD; (3) tingkat meneruskan dari SD ke SLTP rendah, disamping rendahnya tingkat *drop out* baik di SD maupun SLTP; (4) besarnya jumlah lulusan SD yang tidak meneruskan ke SLTP membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa memasuki pasar kerja (Daliyo, 2004 : 5).

Berbagai strategi telah diterapkan dan berbagai kemungkinan kendala yang menghambat juga telah diantisipasi. Namun demikian, gerakan wajib belajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran jumlah anak putus sekolah masih sangat besar dibandingkan mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian tahun 2006-2007 data angka putus sekolah SD/MI adalah sebesar 30.63% sedangkan untuk SLTP dan

MTS sebesar 32,45 (*PDIP-Balitbang, Depdiknas, 2007*)

Alasan lain yang melatarbelakangi masalah adalah bahwa anak usia sekolah (7 -15) di Distrik Semangga Kabupaten Merauke yang berjumlah 1.837 masih ditemukan anak yang tidak tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SLTP. Anak yang tidak tamat SD berjumlah 223 (12,13%) dan anak yang tidak melanjutkan ke SLTP 353 (19,21%). Hal ini berarti masih 31% lebih anak yang tidak melanjutkan pada jenjang SD dan SLTP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun masih belum memenuhi sesuai apa yang diharapkan.

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Namun demikian masih terkendala dalam berbagai aspek dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut nampak dari identifikasi masalah mulai dari tingkatan nasional sampai di lokasi penelitian berikut :

1. Di kancah internasional data UNDP tentang *Human Depelopment Index* (HDI) menunjukkan dari 174 negara, Indonesia berada pada posisi kurang menggemblirakan yakni peringkat 110
2. Secara nasional, faktor geografis mendasari keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut karena rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dengan pandangan yang tradisional. Oleh karena itu sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Keadaan seperti ini merintanggi tersebarluasnya kesempatan pendidikan secara merata.
3. Ada empat kendala yang sudah di antisipasi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun, yaitu (1) secara kuantitatif target

- yang harus dikejar sangat besar (minimal 95% Target APK 2008) terutama karena besarnya jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP; (2) tingkat partisipasi sekolah pada usia SLTP rendah (60,19%) dibandingkan dengan usia SD (94,57%); (3) tingkat meneruskan dari SD ke SLTP rendah, disamping rendahnya tingkat *drop out* baik di SD maupun SLTP; (4) besarnya jumlah lulusan SD yang tidak meneruskan ke SLTP membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa memasuki pasar kerja, berdasarkan data PDIP-Balitbang, Depdiknas 2006 lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP sebesar 50,24%.
4. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran jumlah anak putus sekolah masih sangat besar dibandingkan mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian tahun 2006-2007 data angka putus sekolah SD/MI adalah sebesar 30.63% sedangkan untuk SLTP dan MTS sebesar 32,45
 5. Masih tingginya angka partisipasi lulusan sekolah untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Masih ada 31% lebih anak yang tidak melanjutkan pada jenjang SD dan SLTP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun masih belum memenuhi sesuai apa yang diharapkan.
 6. Berdasarkan kondisi di lapangan di duga masih terdapat pandangan masyarakat yang kurang mendukung terhadap peningkatan pendidikan di di Distrik Semangga Kabupaten Merauke.
- Permasalahan dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah pandangan orangtua terhadap nilai anak terkait dengan partisipasi dalam mengikuti program pendidikan?
 2. Apakah ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh persepsi orangtua tentang pendidikan?
 3. Apakah ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di Distrik

Semangga Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orangtua?

4. Faktor-faktor lain apakah (selain yang telah diduga sebelumnya) yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada pendidikan dasar di Distrik Semangga Kabupaten Merauke atau aspek apa saja yang dianggap sebagai pendukung dan pendorong pelaksanaan program Wajar di Semangga Kabupaten Merauke?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. keterkaitan pandangan orangtua tentang nilai anak dengan partisipasi pada program wajib belajar sembilan tahun.
2. keterkaitan persepsi orangtua tentang pendidikan dengan partisipasi pada program wajib belajar sembilan tahun.
3. keterkaitan kondisi sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pada program wajib belajar sembilan tahun.
4. faktor-faktor lain (selain dugaan awal) yang dianggap terkait dengan partisipasi masyarakat pada program Wajar 9 tahun di distrik

Semangga Kabupaten Merauke

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : (1) Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan informasi faktual pengaruh pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap program wajib belajar sembilan tahun selain itu agar mereka ikut memikirkan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut; (2) Bagi orangtua, penelitian ini dapat memberikan masukan agar mereka mengubah pandangannya tentang nilai anak dan visi pendidikan demi menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun; (3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Teori-teori penelitian ini meliputi

1. Implementasi Kebijakan Publik

Agar dapat memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu perlu mengetahui maksud yang terkandung didalamnya. Ada dua konsep utama yang harus dimengerti secara benar. Per-

tama, adalah konsep tentang implementasi dan *kedua*, adalah konsep tentang kebijakan publik. Namun, untuk memudahkan dalam memahami dua konsep besar itu (implementasi dan kebijakan publik) maka pembahasan konseptual tersebut akan dimulai dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan dan kemudian baru kedua konsep itu dipahami secara utuh.

Beberapa pendapat seperti dikemukakan oleh Harold Lasswell dan Abraham Kaplan (2001: 15) memberikan arti bahwa kebijakan sebagai "suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah". Carl J. Friedrich (2000: 20) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat dicapai. Implementasi kebijakan itu sendiri harus menyediakan

sarana untuk melaksanakannya sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut A. Mazmanian dan Paula A. Sabatier (Wahab 1997: 21) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Adapun teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1994) menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya teori ini juga menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi.

Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994:22) implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan atau dalam studi implementasi akan melihat adanya dimensi atas suatu

organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi tersebut dengan lingkungan. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Akan tetapi, hal ini tidak lah selalu berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle di pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)

Menurut Paula A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab, 1997:81) bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi. Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kemudahan implementasi akan ditentukan oleh mudah

tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan.

- b. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses Implementasi.
- c. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses Implementasi.

Senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya, menurut George C. Edward III (dalam Subarsono. AG, 2000 : 90) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, antara lain :

- a. Komunikasi; merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjaka. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.
- b. Sumber-sumber daya (*resources*); dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
- c. Sikap-sikap (*disposisi*); sikap dari pelaksana program

akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.

- d. Struktur; dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Dari berbagai teori yang telah disampaikan para ahli diatas maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai landasan penelitian. Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (*disposisi*), sumber daya, dan struktur birokrasi.

Dalam hal ini penulis hanya akan mengadopsi dua variabel bebas dari teori implementasi Edward yang

relevan dengan kondisi permasalahan di lapangan, yaitu sikap dan sumber daya. Selanjutnya, dalam pemecahan indikator (*breakdown indicator*) tentang implementasi nantinya akan di adakan modifikasi teori dari George C. Edward III dan pakar lainnya dengan indikator implementasi dari Dinas Pendidikan selaku organisasi pelaksana program. Dengan demikian, hasil analisisnya diharapkan lebih memadai.

2. Partisipasi Masyarakat pada Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan partisipasi masyarakat, posisi tawar masyarakat di mata pemerintah menjadi meningkat, masyarakat tidak selalu di dikte dan di dominasi oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atau keputusan dalam pembangunan lingkungannya namun selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977:8) menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari :

- a. Pengambilan keputusan.
- b. Implementasi
- c. Pemanfaatan (*Benefits*)
- d. Evaluasi Program Pembangunan

Untuk memahami secara jelas dan terperinci mengenai tahapan-tahapan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan penulis akan menguraikan tahapan partisipasi dimaksud.

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsur masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain. (Siagian, 1972: 108).

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan, biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi seluruh.

Koentjaraningrat (1984), menyatakan bahwa partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu :

- 1) Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Dalam tipe yang pertama, rakyat pedesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik. Kalau rakyat ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa proyek itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas, tanpa mengharapkan upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya diperintah dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta bendanya kepada proyek tadi, maka mereka tidak akan turut berpartisipasi dengan semangat tadi. Contoh. Partisipasi orang desa dalam pemba-

- ngunan jalan, membuat saluran irigasi.
- 2) Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktivitas bersama yang kusus, tapi masuk termasuk proyek pembangunan, tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri. Contoh partisipasi dalam kegiatan KB.
- c. Partisipasi dalam menerima hasil atau manfaat pembangunan. Banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara *material benefit* dan *social benefits*.. *Material benefits* dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan *social benefits* seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan-jalan, fasilitas transportasi. (Cohen dan Uphop, 1977: 47)
- d. Partisipasi masyarakat dalam menilai pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff, membedakan tiga jenis evaluasi :
- 1) *Project Contered Evaluation*.
 - 2) *Political Activities*.
 - 3) *Public Opinion Efforts*.
- Project Contered Evaluation*, bila evaluasi ini dipandang sebagai proses evaluasi formal, sedangkan dalam *Political Activities* berkaitan dengan pemilikan anggota-anggota parlemen rakyat setempat atau pemimpin setempat. *Public Opinion Efforts*, opini publik dalam mengevaluasi suatu program tidak secara langsung, melainkan mempengaruhi melalui mass media/surat kabar. Misal : melalui surat pembaca dalam mengungkapkan beberapa gagasan (Cohen dan Uphop, 1977: 56-58)
- Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah : (1)

Wawancara semi struktur; (2) Observasi; (3) FGD (Fokus Group Diskusi).

Metode analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, dan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Partisipasi pada Program Wajib Belajar sembilan Tahun

Kajian utama dalam penelitian ini adalah implementasi program Wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga. Banyak definisi tentang implementasi yang telah disajikan dalam bab tinjauan pustaka, dan untuk pembahasan lebih lanjut, menggunakan definisi dari Meter dan Horn, yakni : Implementasi yang di artikan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam suatu kebijakan. Mengingat bahwa program wajib belajar sembilan tahun dalam implementasinya, menempatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung

program wajar sembilan tahun dimaksud.

Pembahasan akan menggunakan model George Edward III. Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (*disposisi*), sumber daya, dan struktur birokrasi. Sikap dari pelaksana program akan sangat mempengaruhi didalam tahap implementasi. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan, begitupun sebaliknya. Sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan, selain itu pula sikap pelaksana program di lapangan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program, kondisi masyarakat di Distrik semangga memiliki suatu budaya yang apabila mereka dikhanati mereka akan susah untuk memaafkan "orang marind" kalau sudah bilang "matohale" jangan harap mereka mau mendengar apa yang

disampaikan walaupun itu suatu program dari pemerintah.

Fenomena yang sering muncul yakni karena kondisi geografis dan budaya masyarakat terkadang menjadi alasan bagi para petugas menjalankan tugas dalam memberikan sosialisasi tentang program wajib belajar sembilan tahun, sebagai pelaksana seharusnya lebih mengedepankan proses pencapaian tujuan daripada suatu kebijakan, sebagai contoh, dalam pelaksanaan sosialisasi program wajib belajar sembilan tahun di kabupaten Merauke dimana pesertanya terdiri dari unsur pemerintah (kepala Distrik, Kepala Kampung, dan Kepala Sekolah), Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama, para peserta di undang ke Kabupaten yang jaraknya cukup jauh dan memakan waktu dan biaya, sehingga proses pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena banyak peserta yang tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut.

Dari fenomena tersebut, dapat diambil suatu pelajaran tentang bagaimana menyiapkan sebuah organisasi pelaksana agar lebih efektif dan efisien.

Apabila proses tahap pelaksanaan program terbentur oleh kualitas SDM di Masyarakat, maka disinilah peran serta kemampuan para petugas pelaksana diuji kemampuannya dalam melaksanakan program pemerintah.

2. Pandangan Orangtua Tentang Nilai Anak.

Pandangan orangtua tentang nilai anak merupakan pandangan orang tua dalam melihat nilai anak, baik dari segi positif maupun negatifnya. Segi positif terlihat dalam kepuasan, kebaikan dan keuntungan sedangkan segi negatifnya dilihat dari ongkos, beban kesulitan, dan kerugian. Dengan demikian pandangan orangtua tentang nilai anak dapat dilihat dari visinya dalam melihat manfaat anak. Dalam kehidupan di pedesaan/kampung, sebagian nilai positif anak akan memegang peranan penting dalam membantu memutar roda ekonomi rumah tangga keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, pada umumnya orangtua merasa puas jika anak mereka dapat membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarga, anak dipandang memiliki nilai yang tinggi dan akan memberikan kepuasan yang tinggi apabila dapat membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya akan, anak akan memiliki nilai yang rendah atau tidak menimbulkan kepuasan orang tua apabila tidak dapat membantu orang tua dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jadi, semakin besar kontribusi anak dalam membantu orang tua semakin besar pula rasa kepuasan orangtua.

Rendahnya pandangan orangtua tentang nilai anak disebabkan karna kurang/atau rendahnya kualitas Sumber Saya Manusia, terutama pendidikan orangtua, kalau kita lihat di lokasi penelitian terkait dengan upaya pemberian informasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak sangat kurang, hal ini perlu adanya perencanaan dan koordinasi antara instansi terkait dalam pengembangan sumber daya masyarakat, sehingga wawasan dan pengetahuan masyarakat akan bertambah baik dalam melihat kehidupan di masa depan.

3. Persepsi orang tua Tentang Pendidikan

Persepsi orang tua tentang pendidikan yaitu anggapan orang tua dalam memandang fungsi pendidikan bagi anaknya. Oleh karena itu, pandangan tersebut dapat diamati dari cara orangtua dalam menilai arti penting belajar bagi anak-anaknya dan dapat pula dilihat dari cara memahami nilai fungsional pendidikan bagi masa depan anaknya.

Persepsi orangtua tentang pendidikan anak merupakan suatu konsep pikir orangtua mengenai makna dan arti penting proses pendidikan, kesadaran akan pentingnya pendidikan akan menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi orangtua dalam menyelesaikan anaknya. Disamping itu keputusan orangtua untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikan anak akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya siswa yang putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, di Distrik Semangga bahwa pada umumnya orangtua dalam memandang pentingnya pendidikan bagi anaknya masih

sangat rendah, sehingga mereka tidak memperdulikan anak-anak mereka mau sekolah atau tidak. Fenomena lain yang berkembang di masyarakat bahwa rendahnya partisipasi sekolah disebabkan oleh pengaruh lingkungan, dimana anak-anak lebih suka pergi ikut orangtua ke hutan atau ke kebun untuk membantu orangtuanya bekerja, di samping itu pula bahwa lingkungan alam lebih menarik perhatian mereka daripada untuk pergi ke sekolah. Hal lain yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi pendidikan adalah kegiatan pesta adat (gatsi, yamui), dimana dalam kegiatan ini di ikuti oleh seluruh marga marind yang ada di merauke, dan otomatis anak-anak mereka ikut dalam acara dimaksud, padahal acara tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai 1 bulan, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap aktifitas belajar anak-anak dan biasanya karna lama meninggalkan bangku sekolah sebagian besar mereka tidak mau kembali ke bangku sekolah.

Kondisi seperti ini kalau dibiarkan akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan generasi mendatang, oleh karna

itu perlu ada suatu upaya dari pemerintah terhadap perbaikan sistem pendidikan dan budaya, pemerintah dan semua unsur masyarakat tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala suku), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), duduk bersama untuk membicarakan tentang kepentingan pendidikan bagi anak-anak. Dalam mengimplementasi kebijakan hendaknya pemerintah menjalin suatu komunikasi, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat, LMA dan tokoh-tokoh agama karena mereka mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

4. Kondisi Sosial Ekonomi Orangtua

Kondisi sosial ekonomi orangtua adalah kedudukan orang tua atau kelas orangtua dalam kehidupan bermasyarakat serta dilihat dari pendapatan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi sosial ekonomi meliputi kemampuan sosial ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.

Status sosial keluarga (orangtua) yang rendah menyebabkan ketidak mampuan orangtua dalam memberikan fasilitas belajar yang memadai pada anak-anaknya. Pendidikan

rendah yang disandang orangtua menyebabkan tidak mampunya orang tua memberikan wawasan tentang pendidikan bagi anaknya, sehingga anak cenderung akan mengikuti pola-pola yang dilakukan orangtuanya, sehingga banyak anak-anak yang tidak sekolah/putus sekolah karena orangtua tidak peduli dengan perkembangan pendidikan bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta diskusi dengan para informan, kondisi ekonomi orangtua rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan, walaupun untuk makan sehari-hari bisa dicari di hutan dan laut namun semua hanya pas-pasan karena pola hidup mereka berbeda dengan orang-orang yang maju, mereka mencari nafkah hanya untuk dimakan hari ini, untuk besok hari mereka tidak terlalu memikirkan, karena mereka beranggapan masih banyak persediaan di hutan maupun di laut, pola pikir mereka tentang pendidikan bagi anaknya sangat rendah, mereka tidak pernah memikirkan fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka penelitian tentang rendahnya partisipasi masyarakat pada implementasi program wajib belajar sembilan tahun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di distrik Semangga masih rendah, berdasarkan standar program wajib belajar sembilan tahun dikatakan berhasil jika nilai APS SD > 95% dan APS SMP > 70%. Berdasarkan data Distrik Semangga tahun 2007, Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 7-12 tahun sebesar 83,32% sementara untuk Angka Partisipasi Sekolah SMP usia 13-15 sebesar 63,12%. Data tersebut menunjukkan bahwa APS SD/ sederajat maupun APS SMP/ sederajat belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga

- Belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Berdasarkan wawancara dengan para informan terkait dengan pandangan orang tua tentang nilai anak dalam program wajib belajar sembilan tahun masih Sangat rendah, hal ini terlihat dari tanggapan orangtua, rata-rata mereka lebih senang apabila anak-anak mereka bisa membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pandangan orangtua tentang nilai anak yang lebih cenderung melihat anak dari segi keuntungan akan sangat berpengaruh dalam kaitannya terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga.
 - c. Berdasarkan wawancara dengan para informan terkait dengan persepsi orangtua tentang pendidikan dalam program wajib belajar sembilan tahun masih Sangat rendah, hal ini terlihat dari tanggapan orang tua, rata-rata mereka tidak peduli anaknya mau sekolah atau tidak dan tidak ada motivasi serta dukungan dari orangtua agar anak mereka sekolah.
 - d. Pandangan orangtua tentang pendidikan di Distrik Semangga sebagian besar memandang pendidikan tidak begitu penting hal ini terbukti bahwa tidak adanya dorongan serta dukungan terhadap program wajib belajar sembilan tahun.
 - e. Rendahnya kondisi sosial ekonomi orangtua mengakibatkan rendahnya pula kemampuan serta dukungan orangtua terhadap program wajib belajar sembilan tahun.

2. Saran

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan, maka dari hasil kajian penelitian tentang implementasi program wajib belajar sembilan tahun, penulis memberikan konsep implementasi program wajib belajar sembilan tahun sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di distrik Semangga belum sesuai dengan harapan, oleh karena itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dalam wujud sosialisasi dari segenap elemen pemerintah (Dinas Pendidikan, Kepala Distrik, Kepala Kampung) dan Masyarakat (Tokoh

- agama, LSM, Kepala Dusun, LMA, dll) untuk bersama-sama mendukung proses implementasi program wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga.
- b. Perlu adanya upaya pemerintah dengan melakukan pendekatan budaya (melalui tokoh adat) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nilai anak jangan dilihat dari segi manfaatnya saja, tapi anak juga mempunyai kewajiban untuk mengenyam pendidikan demi masa depan mereka.
 - c. Mengenai pandangan orangtua tentang pendidikan, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya pendidikan dasar bagi anak.
 - d. Kondisi sosial ekonomi orangtua masih rendah, sehingga perlu adanya program perbaikan ekonomi dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Daftar Pustaka

Cohen. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation : Concept and Measures For*

Project Design Implementation and Evaluation. New York : *Rural Development Commite-Cornel University*.

Daliyo. 2004. *Pekerja anak dan Perencanaan Pendidikan*. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional dan penjelasannya*. Jakarta : Depdiknas, RI.

Friederick, Corl. J. 2000. *Man and His Government*. New York : McGraw Hill.

Hadikusumo, S. 1995. *Analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Jakarta : Budi Aksara.

Kasward. 1998. *Mandat Masyarakat yang dijalankan oleh Sistem Sekolah*. Jakarta : Rieneka Cipta.

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.

- Laswell, Harold. & Abraham Kaplan. 2001. *Power and Society*. New Heaven : Yale University Press.
- Meter, Donald S. Van. & Carl E. Van Horn. 1994. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework. Administration and Society*. Vol. 6.
- Natsir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sastrosupono. 1984. *Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Indonesia*. Bandung : Rosdyakara.
- Siagian, Sondang P. 1972. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Surya, Moh. 2004. *Pokok-Pokok Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subarsono, AG. 2000. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- UNDP. 2005. *Human Development Report*.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- . 2003. *PDIP Balitbang*. Jakarta : Depdiknas, RI.